

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2011-2016 Kabupaten Banjarnegara merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara memuat arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. VISI & MISI

Sebagai daerah otonom Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan tujuan daerah. Dalam periode 2011-2016, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan visi :

“TERWUJUDNYA BANJARNEGARA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing;
- 2) Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
- 3) Mewujudkan Kondisi Aman, Damai, Demokratis dan Religius;
- 4) Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Prioritas Penegakan Hukum, Penghargaan Hak Asasi Manusia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6) Mewujudkan Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pengembangan Seni Budaya, Penghargaan Tradisi dan Kearifan Lokal.

2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :



MISI 1 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL YANG BERDAYA SAING

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Meningkatkan peran sektor pertanian dan pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah	1 Meningkatkan ketahanan pangan	1 Peningkatan produk dan pengelolaan konsumsi pangan	1 Pengembangan diversifikasi keanekaragaman produk pangan	
	2 Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang berkualitas	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian	1 Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian	1 Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian
			2 Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal	2 Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal
			3 Pengendalian serangan OPT sertaantisipasi rawan bencana alam	3 Pengendalian serangan OPT sertaantisipasi rawan bencana alam
			4 Peningkatan sarana prasarana pertanian	4 Peningkatan sarana prasarana pertanian
	3 Meningkatkan kesejahteraan petani	1 Peningkatan Nilai Tukar Petani	1 Pengembangan agribisnis pertanian	
	4 Meningkatkan produksi peternakan	1 Peningkatan produksi, populasi, pemasaran dan pengendalian penyakit ternak	1 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan	
5 Meningkatkan produksi perikanan	1 Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan	1 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya		
6 Meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan yang berkualitas	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perkebunan	1 Peningkatan kualitas SDM perkebunan dan pengelolaan lahan secara optimal		
7 Meningkatkan kunjungan wisatawan		1 Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran, dan kemitraan pariwisata	1 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata	
			2 Pengelolaan even pariwisata	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan peran sektor perdagangan sebagai pendukung perekonomian daerah	1 Meningkatkan kinerja perdagangan	1 Pengembangan iklim perdagangan yang kondusif	1 Meningkatkan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan
Meningkatkan peranan koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan dalam perekonomian daerah	1 Meningkatkan kapasitas Koperasi, UMKM dan kelembagaan ekonomi pedesaan	1 Peningkatan akses koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan terhadap sumberdaya produktif	1 Pengembangan kelembagaan, kualitas SDM, dan akses permodalan koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan
Meningkatkan investasi dan industri untuk perluasan lapangan kerja	1 Meningkatkan jumlah investasi	1 Penciptaan iklim investasi yang kondusif	1 Peningkatan promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal
	2 Meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1 Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja	1 Penyediaan informasi tenaga kerja 2 Pelatihan SDM tenaga kerja
	3 Meningkatkan kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah	1 Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan UMKM	1 Pemberian Fasilitas permodalan koperasi dan UMKM
	4 Meningkatkan produksi pertambangan dan energi	1 Pengelolaan hasil pertambangan dan energi sesuai daya dukung lingkungan	1 Pembinaan usaha pertambangan dan energi



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan peran sektor kehutanan dalam perekonomian daerah	1 Meningkatnya produksi hasil kehutanan	1 Pengelolaan hasil hutan sesuai daya dukung lingkungan	1 Pembinaan usaha kehutanan, kemitraan, dan mengembangkan diversifikasi produk hasil hutan

MISI 2 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan daerah	1 Meningkatnya kualitas SDM aparatur	1 Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaran pendidikan formal dan diklat
Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1 Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD	1 Pengembangan sistem perencanaan yang partisipatif	1 Fasilitasi proses perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, <i>top down</i> dan <i>bottom up</i>
	2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian	1 Pengawasan bersifat preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah	1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Peningkatan pelayanan prima	1 Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik
		2 Mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat	2 Pengembangan SOP, SPP, OSS 1 Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov)
Meningkatkan Kapasitas Keuangan dan Aset Daerah	1 Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah serta meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah	1 Peningkatan Pengelolaan Pendapatan, aset daerah dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1 Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan
			2 Pengembangan sistem informasi manajemen Keuangan Daerah dan Aset Daerah
			3 Revitalisasi BUMD
Meningkatkan pengelolaan kearsipan daerah	1 Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah	1 Penataan dan Pengembangan Sistem Kearsipan Daerah	1 Peningkatan sistem pengarsipan, SDM Aparatur dan Sarana Kearsipan Daerah
Meningkatkan Pelayanan komunikasi, informasi, dan penataan administrasi kependudukan	1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Peningkatan Sistem kependudukan, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi	1 Penataan, Pemutakhiran dan Pemasarakatan Informasi	1 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media Massa

**MISI 3 : MEWUJUDKAN KONDISI AMAN, DAMAI, DEMOKRATIS DAN RELIGIUS**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1 Pemantapan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1 Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana	1 Menurunnya jumlah korban bencana	1 Peningkatan mitigasi manajemen bencana	1 Meningkatkan Kesiapan, Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
Meningkatkan kehidupan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi	1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	1 Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat
		2 Meningkatnya peran dan fungsi partai politik dalam Pemilu	
Meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan toleransi beragama	1 Meningkatnya pemahaman kebangsaan, ajaran agama, serta norma-norma lainnya dalam kehidupan bermasyarakat	1 Perwujudan suasana aman dan kondusif dalam beragama dan bermasyarakat	1 Pembinaan Ormas, LSM, OKP dalam kehidupan beragama secara berkesinambungan

**MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah penunjang perekonomian	1 Meningkatkan sarana infrastruktur yang menunjang iklim usaha investasi	1 Peningkatan aksesibilitas dengan memperhatikan prioritas Daya Dukungnya bagi pengembangan ekonomi	1 Peningkatan dan pengembangan jalan 2 Peningkatan dan pengembangan jembatan 3 Pembangunan jalan lingkar utara 4 Pembangunan wajah kota dengan sungai serayu sebagai lambang kota
	2 Meningkatkan sarana dan prasarana perumahan yang layak huni	1 Peningkatan penyediaan kebutuhan perumahan	1 Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan 2 Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum 3 Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan 4 Fasilitasi dan pembangunan Sarana Prasarana Sosial
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah penunjang perekonomian	3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	1 Peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan	1 Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang informatif 2 Pengendalian kelayakan angkutan 3 Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung 4 Pengembangan dan optimalisasi terminal
	4 Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi	1 Peningkatan pelayanan sarana prasarana informasi dan komunikasi	1 Fasilitasi pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informasi berbasis IT



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	5 Meningkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur pedesaan	1 Peningkatan dan pemerataan infrastruktur pedesaan	1 Rehabilitasi infrastruktur jalan di pedesaan 2 Stimulasi pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan
	6 Meningkatnya penanganan daerah rawan bencana	1 Peningkatan kualitas jaringan drainase dan pengendalian banjir	1 Normalisasi sistem drainase 2 Fasilitasi dan pengembangan tanggul terpadu
Mewujudkan penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya wilayah	1 Terwujudnya tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah	1 Pengendalian dan Pendayagunaan rencana tata ruang	1 Peningkatan efektivitas peran rencana tata ruang sebagai pedoman keruangan dalam pembangunan daerah 2 Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan	1 Terkendalinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup	1 Pengendalian kerusakan dan pencegahan lingkungan hidup	1 Pengembangan manajemen pengelolaan persampahan 2 Pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup 3 Peningkatan perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan pemulihan SDA LH 4 Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	2 Meningkatnya pengelolaan sumber daya energi	1 Optimalisasi potensi sumber energy	1 Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) 2 Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

MISI 5 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM, PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pendidikan bermutu dan terjangkau	1 Meningkatnya perluasan akses pendidikan dan partisipasi masyarakat	1 Perbaiki sistem dan akses pendidikan	1 Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial serta dukungan infrastruktur data dan informasi pendidikan
	2 Tersedianya akses infrastruktur pendidikan		2 Peningkatan dukungan sarana prasarana pendidikan
	3 Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan		3 Perbaiki sistem tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka peningkatan profesionalisme pelayanan pendidikan
	4 Meningkatnya mutu pendidikan		4 Peningkatan mutu pendidikan
	5 Meningkatnya minat baca masyarakat		5 Peningkatan kualitas layanan perpustakaan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjamin dan meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang merata	1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	1 Perbaikan sistem dan akses pelayanan kesehatan masyarakat	1 Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin
			2 Peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur bidang kesehatan secara bertahap
			3 Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	1 Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	1 Peningkatan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial	Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
			2 Meningkatkan penanganan dan pembinaan PMKS
			3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial
			4 Fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana prasarana pelayanan
		2 Peningkatan pelayanan Ketransmigrasian	1 Fasilitasi pengerahan dan penempatan transmigrasi
	2 Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	1 Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat	1 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak	1 Percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan	1 Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan perlindungan anak
			2 Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan
			3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
			4 Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak
			5 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Meningkatkan kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera	1 Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana	1 Optimalisasi kualitas pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi
			2 Fasilitasi pengembangan ekonomi bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.
Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan	1 Meningkatkan profesionalisme angkatan kerja	1 Perbaiki sistem ketenagakerjaan	1 Perbaiki kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja
Mewujudkan kesadaran dan tertib hukum	1 Meningkatkan tertib hukum	1 Peningkatan Penegakan Hukum	1 Penegakan PERDA
			2 Pembinaan Kesadaran Hukum



MISI 6 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA, PENGHARGAAN TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga baik nasional maupun internasional	1 Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan	1 Pengembangan potensi kepemudaan	1 Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan
	2 Meningkatkan pencapaian prestasi olahraga	1 Peningkatan Prestasi Olah Raga	1 Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat
			2 Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan internasional (sport centre)
			3 Menggalakkan budaya olahraga dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan berbagai event olah raga pada berbagai tingkat dan jenis cabang olah raga
4 Pembinaan atlit dan pelaku olahraga			
Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah, serta melindungi bangunan bersejarah dan cagar budaya sebagai identitas bangsa	1 Meningkatkan pelestarian seni budaya	1 Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal	1 Pengembangan identitas daerah
	2 Meningkatkan kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya		2 Perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya
			3 Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan
			4 Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan lokal
			5 Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarian benda/bangunan cagar budaya

B. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN DATA KINERJA

1. Simrenbangda (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah)

Merupakan Sistem Informasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mendukung pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, Hasil Reses DPRD dan Evaluasi RKPD. Rencana Program dan Kegiatan yang telah diinput didalam aplikasi SIMRENBANGDA akan secara otomatis tersimpan dan terekam serta dapat dibuka oleh admin Bappeda dan SKPD sesuai dengan *username* dan *password* yang diberikan kepada masing-masing SKPD. SIMRENBANGDA dapat diakses melalui alamat website : www.simrenbangda.banjarnegarakab.go.id. Program dan kegiatan yang tertuang didalam SIMRENBANGDA akan digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya (n+1) dan KUA PPAS tahun berikutnya.

Gambar 2.1.

Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENBANGDA)



2. Simda Keuangan

Merupakan aplikasi yang memfasilitasi pencatatan dan penyajian data transaksi keuangan yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan yang disusun secara terintegrasi dan dilaksanakan oleh semua SKPD. Aplikasi ini mulai diimplementasikan pada Tahun 2008, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pada Tahun 2012 simda keuangan dikembangkan dengan berbasis *online* sehingga dapat mempermudah setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh SKPD dan pihak terkait.

Gambar 2.2.
Aplikasi SIMDA Keuangan



3. Simda BMD (Barang Milik Daerah)

Merupakan aplikasi yang memfasilitasi pencatatan dan penyajian data terhadap beberapa tahapan dalam pengelolaan barang milik daerah, meliputi perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, penggunaan aset, penatausahaan aset, pemanfaatan aset, pemeliharaan dan penghapusan aset. Melalui aplikasi ini inventarisasi terhadap barang milik daerah akan terhimpun dalam sebuah *data base* yang memudahkan untuk dapat diakses setiap saat.

Gambar 2.3.
Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)



4. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

Merupakan aplikasi yang memfasilitasi penyajian data Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa pada semua SKPD. Tujuan adanya SIRUP adalah dalam rangka keterbukaan informasi publik sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat mengaksesnya dengan mudah.

Gambar 2.4.
Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)



5. TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik)

Merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam bidang tata naskah dinas. Melalui aplikasi ini pengelolaan tata naskah dinas menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam Tata Naskah Dinas Elektronik pengelolaan surat menyurat tidak lagi melalui tatap muka secara langsung baik dari konseptor ke penandatangan maupun dari pengirim ke penerima surat, karena begitu konsep surat disetujui oleh penandatangan, maka pada saat itu juga surat tersebut terkirim dan dapat dibaca oleh penerima surat. Aplikasi ini berbasis internet, dengan adanya aplikasi ini terdapat efisiensi waktu dalam pengelolaan dan pengiriman surat.

Gambar 2.5.
Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)



6. SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)

Merupakan aplikasi yang dibangun dalam rangka penyediaan data pilah gender daerah. Aplikasi ini mempermudah SKPD dalam melaporkan data pilah gender sehingga bisa digunakan secara *online*. Aplikasi ini juga digunakan sebagai dasar penyusunan data pilah gender daerah.

Gambar 2.6.
Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

7. SIG (Sistem Informasi Geografis) Kemiskinan

Merupakan Sistem Informasi berbasis peta geografis yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan untuk melakukan perencanaan Program /Kegiatan terkait dengan penanganan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara. Manfaat adanya SIG Kemiskinan adalah tersedianya data representasi grafis wilayah yang perlu mendapat prioritas penanggulangan kemiskinan, memberikan kemudahan dalam penentuan daerah yang perlu diprioritaskan sehingga kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran dan tepat program.

Gambar 2.7.
Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Kemiskinan



C. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Banjarnegara ditetapkan 6 (enam) misi, 40 (empat puluh) sasaran, 73 (tujuh puluh tiga) Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2016 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.